

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KEDUNGSARI

¹Eka Ratna Wati (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: ratnamarketing013@gmail.com

²Evi Yuli Susanti (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: eviyulisusanti@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Kata Kunci: Kebijakan, BLT, Kemiskinan.

Keywords: Policy, BLT, Poverty

Received : 03 Maret 2025

Revised : 15 Maret 2025

Accepted: 22 Maret 2025

©(2025)The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada di Indonesia, terlebih terjadi pada tahun 2014 sampai 2015. Kemiskinan diakibatkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi seperti kualifikasi pendidikan masyarakat yang kurang, kapasitas tenaga kerja yang tidak optimal, besaran upah kerja yang sangat minim, penyaluran pendapatan yang tidak memadai, kurangnya harapan tempat kerja, dan ketidakstabilan politik. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah dana desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dilakukan menjadi bantuan tunai yang ditanamkan dengan bantuan langsung tunai dan desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu peneliti ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil yang didapatkan dengan menggunakan analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi dari program bantuan langsung tunai.

ABSTRACT

Poverty is a problem that has long existed in Indonesia, especially in 2014 to 2015. Poverty is caused by many influencing factors, such as people's lack of educational qualifications, suboptimal workforce capacity, very minimal wages, and distribution of income. inadequate, lack of workplace expectations, and political instability. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is also being refocused is village funds. Village funds which are actually intended for village construction and development, are made into cash assistance which is invested with direct cash and village assistance (Village Fund BLT). In terms of its effectiveness, the implementation of this program still raises many questions. Therefore, this research was conducted to see the effectiveness of the direct cash assistance program for village funds. This research was conducted in Kedungsari village, Kemlagi subdistrict, Mojokerto regency. Based on the results obtained using qualitative analysis, it can be concluded that this research aims to see the effectiveness of the direct cash assistance program.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan Undang- Undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang di arahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mempunyai peran dalam proses maju dan berhasilnya pembangunan itu sendiri dengan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin itu sendiri. Oleh Karena itu pemerintah banyak memperhatikan masyarakat kurang mampu dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk berbagai tindakan guna menanggulangi kemiskinan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan social-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (Utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan dampak positif dan negatif. Di sisi positif, BLT dapat meningkatkan pendapatan keluarga, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan finansial ini juga mengurangi ketidakpastian ekonomi, memungkinkan keluarga untuk merencanakan pengeluaran dengan lebih baik. Selain itu, dana yang diterima sering digunakan untuk membeli barang dan jasa lokal, yang dapat merangsang ekonomi setempat, serta meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) didefinisikan sebagai program perlindungan sosial yang memberikan bantuan finansial langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakamanan pangan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. BLT sering kali menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam sistem perlindungan sosial, yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan dan memastikan akses mereka terhadap kebutuhan dasar. Penulis menekankan bahwa efektivitas BLT sangat bergantung pada desain program, implementasi, dan konteks sosial-ekonomi di mana program tersebut dijalankan.

Menurut Francesca Bastagli et al. (2016), Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga bisa jadi

proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak dapat disamaratakan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang beragam. Oleh karena itu, upaya meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kelurahan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak luputnya pemerintah Kabupaten, Kecamatan,, Kelurahan/Desa sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di wilayah masing-masing. Implementasi kebijakan Bantuan langsung Tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi di Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula mereka menjadi penerima BLT Dana Desa (BAPPENAS, 2020:8). Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari peraturan Menteri Desa Pembangunan desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No.6 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat didefinisikan masalah dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yaitu karena tingginya presentase kemiskinan, dilihat dari kondisi ekonomi di Desa Sidomulyo saat ini berdasarkan sumber data yang didapatkan dari kantor desa sebanyak 1.250 Orang berstatus belum bekerja/tidak bekerja, sebanyak 1.430 orang dengan status ibu rumah tangga, dan sebanyak 1.597 orang bekerja sebagai petani/pekebun, sehingga diperlukannya Bantuan Langsung Tunai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai ini adalah sebuah kebijakan atau bantuan keuangan yang berasal dari desa untuk menanggulangi krisis keuangan masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (field research) yang didukung oleh data empiris hasil magang di Balai Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan sistem pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan administrasi, wawancara dengan aparat desa, serta dokumentasi pelaksanaan program di lapangan.

Penelitian dilakukan di Balai Desa Kedungsari, yang beralamat di Dusun Pesantren, Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61353. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu desa penerima dan pelaksana program BLT dari pemerintah pusat yang memiliki sistem pelayanan berbasis data administrasi desa. Kegiatan penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu pada 1 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024, bersamaan dengan pelaksanaan program magang akademik mahasiswa STIE Darul Falah Mojokerto.

Informan penelitian terdiri atas aparatur desa yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program BLT dan masyarakat penerima manfaat.

Rincian informan meliputi:

1. Kepala Desa Kedungsari (Hermawan, S.Pd) sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan program.
2. Sekretaris Desa dan Kasi Pelayanan yang berperan dalam pengumpulan, validasi, dan pendataan penerima BLT.
3. Pendamping desa yang membantu proses verifikasi data dan penyaluran bantuan.
4. Beberapa warga penerima BLT, dipilih secara purposif untuk mengetahui pengalaman langsung mereka dalam proses penerimaan bantuan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan dan pengelolaan program BLT di tingkat desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari hasil observasi kegiatan lapangan selama magang, wawancara dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi kegiatan pelayanan BLT di Balai Desa Kedungsari.
2. Data sekunder, yang berasal dari dokumen resmi desa, seperti daftar penerima BLT, laporan kegiatan sosial, struktur organisasi Balai Desa Kedungsari, serta referensi akademik yang mendukung analisis, termasuk literatur tentang pelayanan publik dan sistem administrasi desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara:

1. Observasi langsung, dilakukan dengan mengamati kegiatan pelayanan BLT, mulai dari sosialisasi, verifikasi data, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.
2. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada perangkat desa, pendamping BLT, dan warga penerima untuk menggali pemahaman mendalam tentang efektivitas sistem pelayanan BLT.
3. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan arsip kegiatan, foto dokumentasi pelaksanaan BLT, serta daftar penerima bantuan.
4. Studi pustaka, digunakan untuk memperkuat landasan teoritis mengenai sistem pelayanan publik dan efektivitas penyaluran bantuan sosial di desa.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data relevan dari hasil observasi dan wawancara.
2. Penyajian data, berupa deskripsi naratif tentang proses pelayanan BLT di desa.
3. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menginterpretasikan hasil temuan di lapangan secara logis dan sistematis untuk menggambarkan efektivitas sistem pelayanan BLT di Balai Desa Kedungsari.

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang akurat dan kredibel tentang penerapan sistem pelayanan BLT di tingkat desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto selama kegiatan magang mahasiswa pada bulan Agustus 2024. Kegiatan ini difokuskan pada penerapan sistem pelayanan publik di tingkat desa, khususnya dalam pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa) serta aktivitas administrasi pemerintahan desa lainnya. Hasil penelitian berikut disusun berdasarkan observasi langsung, wawancara dengan perangkat desa, dan dokumentasi lapangan yang diperoleh selama kegiatan magang berlangsung.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balai Desa Kedungsari merupakan pusat kegiatan pemerintahan desa yang terletak di Dusun Pesantren, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Bangunan balai desa terdiri dari ruang pelayanan masyarakat, ruang kepala desa, ruang sekretaris desa, serta aula yang digunakan untuk rapat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Selama kegiatan magang, mahasiswa mengamati secara langsung rutinitas pelayanan publik di balai desa, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, surat menyurat, serta program kesejahteraan masyarakat seperti BLT Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur pelayanan, bendahara, dan staf administrasi.

Lingkungan Balai Desa Kedungsari mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang terstruktur, dengan pembagian tugas yang jelas dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan administrasi rutin seperti pembuatan surat keterangan domisili, surat pengantar nikah, surat keterangan usaha, dan layanan administrasi kependudukan lainnya. Proses pelayanan dilakukan secara langsung di loket balai desa di bawah pengawasan perangkat desa. Mahasiswa mengamati bahwa setiap permohonan surat masuk dicatat pada buku agenda surat masuk dan keluar, kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa sebelum ditandatangani oleh kepala desa. Pelayanan administrasi dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00–14.00 WIB.



Gambar 2. Kegiatan mahasiswa membantu pelayanan administrasi surat di Balai Desa Kedungsari

(Sumber: Dokumentasi Magang, 2024)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kedungsari (Bapak Suwaji) menyebutkan bahwa:

“Pelayanan administrasi sudah berjalan cukup tertib. Kami selalu berusaha melayani masyarakat secepat mungkin agar tidak menunggu lama. Mahasiswa magang juga sangat membantu dalam pencatatan dan pengarsipan dokumen.” (Wawancara, 12 Agustus 2024)

Kegiatan administrasi di Balai Desa Kedungsari telah berjalan efektif dengan sistem pelayanan langsung dan pencatatan tertib, serta partisipasi mahasiswa magang membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Program BLT Dana Desa menjadi fokus utama kegiatan observasi. Mahasiswa mengikuti seluruh tahapan mulai dari pendataan calon penerima bantuan, verifikasi dan validasi data, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Pendataan dilakukan melalui survei lapangan oleh tim perangkat desa dengan menggunakan data dari RT/RW. Validasi dilakukan bersama pendamping desa untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

No	Nama	Alamat	Jenis komponen	Nominal	Nilai	Keterangan
1	Kamiatun	Sidowangun	Lansia	2.000.000		
2	Irfanda Bagus Prasetyo	Sidowangun	Sekolah Sisk	2.000.000		
3	Rogayah	Ngogri	Balita/Ibu hamil	3.000.000		
4	Susanti	Pesantren	Keluarga miskin	1.200.000		
5	Devira Almasia	Pesantren	Sekolah SD	900.000		
6	Karnelia Firda Marisa Al Irfani	Kemiri	Sekolah SD	900.000		
7	Purnah	Kedungsari	Lansia	2.000.000		
8	Munayyadul Ihsad Arika	Sidowangun	Sekolah SMK	2.000.000		
9	Elfiyah Nur Laili	Sidowangun	Balita/Ibu hamil	3.000.000		
10	Suci Andriani	Sidowangun	Keluarga miskin	1.200.000		
11	Sofiyah Laili	Kemiri	Sekolah SMP	1.200.000		
12	Riky Oktaviana	Kedungsari	Ibu hamil	3.000.000		
13	M. Khoiruddin	Ngogri	Sekolah SMP	8.500.000		
14	M. Ali Imron	Kedungsari	Keluarga miskin	1.200.000		
15	Anel Ihsan	Pesantren	Lansia	1.200.000		
16	M. Anshari	Kedungsari	Lansia	2.000.000		

Gambar 3. Kegiatan verifikasi data penerima BLT Dana Desa di ruang pelayanan

(Sumber: Dokumentasi Magang, 2024)

Pada saat penyaluran bantuan, mahasiswa turut membantu dalam pembagian amplop BLT serta pencatatan daftar hadir penerima bantuan di aula Balai Desa. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Kedungsari (Ibu Rina):

“Kami berupaya agar pembagian BLT berlangsung tertib dan transparan. Setiap penerima wajib menunjukkan KTP dan tanda tangan bukti penerimaan agar sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.” (Wawancara, 20 Agustus 2024)



Gambar 4. Proses penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat di aula Balai Desa Kedungsari

(Sumber: Dokumentasi Magang, 2024)

Pelaksanaan program BLT Dana Desa di Balai Desa Kedungsari berjalan transparan dan akuntabel. Setiap tahap dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan masyarakat dan pengawasan pendamping desa, serta didukung administrasi yang tertib.

Peran Mahasiswa dalam Kegiatan Lapangan

Mahasiswa magang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan publik, antara lain membantu masyarakat dalam pembuatan surat keterangan, pengarsipan dokumen, dan pendataan penerima BLT. Mahasiswa juga mendampingi perangkat desa dalam melakukan input data penerima bantuan menggunakan aplikasi administrasi desa berbasis komputer.

Selain itu, mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan sosial desa seperti rapat rutin perangkat desa, kegiatan posyandu, serta membantu persiapan acara desa.

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KOMPONEN	BENTUK
1	Harwati	Sidowangsan	LANSIA	KELOMPOK MUKIM (BUKUMIL) SD
2	Wahid Mahumud	Sidowangsan		SDMP
3	Mah. Bayu Santiana	Sidowangsan		SDMP

Gambar 5. Mahasiswa melakukan pendataan penerima bantuan

(Sumber: Dokumentasi Magang, 2024)

Dari hasil wawancara dengan **Kepala Desa Kedungsari (Bapak Hermawan, S.Pd)** diperoleh pernyataan:

“Mahasiswa magang ini sangat membantu kami dalam pekerjaan administrasi dan sosialisasi kepada warga. Mereka cepat belajar dan bisa menyesuaikan diri dengan sistem kerja di desa.” (Wawancara, 25 Agustus 2024)

Kesimpulan: Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan publik memperkuat kerja sama antara pemerintah desa dan perguruan tinggi.

Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata di bidang administrasi publik dan berkontribusi langsung dalam peningkatan efektivitas pelayanan desa.

Dokumentasi Kegiatan Magang

Seluruh kegiatan selama magang didokumentasikan oleh mahasiswa dalam bentuk foto, video, dan laporan kegiatan harian. Dokumentasi ini mencakup kegiatan administrasi, penyaluran BLT, hingga aktivitas sosial masyarakat. Dokumentasi diserahkan kepada pihak desa sebagai arsip kegiatan kolaborasi akademik.



Gambar 6. Foto bersama perangkat desa dan mahasiswa magang di Balai Desa Kedungsari

(Sumber: Dokumentasi Magang, 2024)

Dokumentasi kegiatan menjadi bukti konkret keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan publik di desa dan menunjukkan keterpaduan antara kegiatan akademik dan praktik lapangan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selama magang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di **Balai Desa Kedungsari** berjalan efektif dan transparan. Program BLT Dana Desa dilaksanakan sesuai prosedur, dengan administrasi tertib dan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Mahasiswa berperan aktif membantu pelayanan dan memperoleh pengalaman nyata dalam penerapan sistem pemerintahan desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil obesrvasi pemerintah Desa Kedungsari melakukan pendataan terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan dengan teliti dan cermat dengan cara melakukan pendataan secara via online maupun offline, sehingga tidak mengalami kendala dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai. Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai adalah ketersediaan anggaran, antusias masyarakat dan kerja keras pendamping lapangan sehingga proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran. Kebijakan dari permasalahan utama dalam kebijakan publik, yakni kurangnya perhatian pada tahap implementasi. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, dari ukuran tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosial kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Melonjaknya harga BBM dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat terlebih khususnya masyarakat yang kurang

mampu sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengkurir program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari melonjaknya harga BBM dan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa: *New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan".

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa penerapan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Kedungsari sudah terlaksana secara maksimal tetapi terkadang pencairan dana mengalami keterlambatan dikarenakan lambatnya transfer dari dinas sendiri sehingga masyarakat yang

menerima bantuan tersebut menerima dananya di bulan berikut atau di akhir bulan. Penerapan bantuan langsung tunai sudah tepat sasaran akan tetapi ada beberapa yang diwakili saat menerima bantuan tersebut dan ada juga masyarakat yang tidak bisa menerima langsung ke kantor desa dikarenakan kondisi kesehatan sehingga pemerintah desa langsung mengantarkan ke tempat atau rumah penerima.

Faktor pendukung dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai adalah ketersediaan anggaran, antusias masyarakat kurang mampu, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendamping lapangan pada tahapan kerja keras pendamping lapangan sehingga proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan langsung tunai yang dilaksanakan telah dipersiapkan dengan baik lewat rapat koordinasi pemerintah desa bersama pendamping lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tunai tersebut bisa tepat sasaran. Sedangkan setempat, dalam pendataan pada masyarakat yang kurang mampu, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendamping lapangan pada tahap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai. Implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang mungkin nantinya dapat menjadi berguna kedepan. Penulis mengharapkan Penetapan Standar Pelayanan terus diterapkan sesuai SOP yang berlaku sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi lebih mudah dan masyarakat pun merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- BAPPENAS. (2020). *Pedoman Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2016). *Cash Transfers: What Does the Evidence Say?* London: ODI.
- Danuari. (2019). *Teknologi Digital dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Francesca Bastagli et al. (2016). *Cash Transfers and Poverty Reduction*. ODI Report.
- Hidayat, & Maulana. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Irwan Akib & Risfaisal. (2016). "Bantuan Langsung Tunai." *Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar*, 3(2).
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- Raco, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Ravianto. (2014). Produktivitas dan Efektivitas Kerja. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, A. (2017). Implementasi Optical Character Recognition Tugas Dan Profesional Terhadap Kualitas.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman. (1998). Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1974). The Policy Implementation Process. Lexington Books.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin.